



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAGONG**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II**
3. NHK : **153651**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 820.000.000

1. Tanah Seluas 6727 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 850 m2/186 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 460 m2/68 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA T4G02T31LO M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.548.957**F. HARTA LAINNYA** Rp. 200.000.000**Sub Total** Rp. 1.193.548.957**III. HUTANG** Rp. 225.595.315**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 967.953.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IBNU HAJAR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
3. NHK : 635387

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	736.866.618
1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m ² /105 m ² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 412.016.875		
2. Tanah Seluas 600 m ² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 89.545.625		
3. Tanah Seluas 1663 m ² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 115.257.618		
4. Tanah Seluas 1175 m ² di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 120.046.500		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	40.290.000
1. MOTOR, YAMAHA B5D A/T Tahun 2019, HADIAH Rp. 15.390.000		
2. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 24.900.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.217.500
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.252.963
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	797.627.081

III. HUTANG **Rp.** **---**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **797.627.081**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.